

PERSINTUHAN HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SUCI RAMADHANI SIREGAR
NPM. 1406200413



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siaga, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SUCI RAMADHANI SIREGAR
NPM : 1406200413
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERSINTUHAN HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.


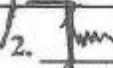

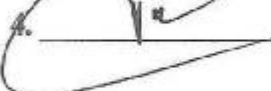
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. MUKHLIS, S.H., M.H.
3. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
4. HIDAYAT, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8823301 Fax. (061) 8825474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SUCI RAMADHANI SIREGAR
NPM : 1406200413
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERSINTUHAN HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA

PENDAFTARAN : Tanggal 17 Desember 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701

Pembimbing II

HIDAYAT, S.H., M.H.
NIDN: 0112118402



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SUCI RAMADHANI SIREGAR
NPM : 1406200413
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
**JUDUL SKRIPSI : PERSINTUHAN HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 05 November 2018

Pembimbing I

ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
NIDN: 0129057701

Pembimbing II

HIDAYAT, S.H., M.H.
NIDN: 0112118402

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Ramadhani S
NPM : 1406200413
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : PERSINTUHAN HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM
HUKUM DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Desember 2018

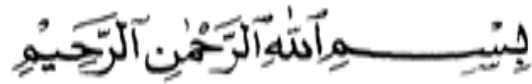
Saya yang menyatakan



Suci Ramadhani S.

SUCI RAMADHANI S

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatuallahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulisan panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Mahasiswa Sumatra Utara. Skripsi ini berjudul **“Persintuhan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”**.

Didalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-NYA hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Keluargaku tercinta ayahanda H. Tasrif Siregar dan ibunda HJ. Sri yanti yang sudah mendukung serta memberikan semangat , perhatian dan kasih sayang serta doa dan restu dan hal-hal lainnya yang belum dapat terbalaskan satu persatu, terimakasih atas segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Dr. Agussani,M.AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ibu Ida Hanifah,S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bapak Faisal,S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Bapak Zainuddin, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Atikah Rahmi,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I dan juga Bapak Hidayat,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, saran dan dukungan yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.

Terimakasih Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

Terimakasih rekan-rekan sealmamater dan seperjuangan, Fithi Erawi Harianja, Elphan Kumbara, Wiranti Tanjung yang telah mendukung memberikan motivasi sehingga kita dapat menyelesaikan skripsi ini bersama, serta terimakasih kepada sahabat yang telah mendukung dan mensupport selama ini Ayu Nurfadhila, Sari Ramadhani,Syarifah Fatma Zahra, Siti AisyaS.H, Sindy Dinda Dwi Putri,S.H, Silvy Nanda Pratama Putri,S.pd.

Terimakasih kepada Syaifin Nuha yang selalu memberikan semangat serta terimakasih kepada adinda tersayang Fitri Handayani atas dukungan serta suportnya selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna,oleh karena itu mohon kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya,semoga skripsi

ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khusus dibidang Hukum.

Akhirnya dengan penuh penghormatan dan kerendahan hati skripsi ini dipersembahkan kepada yang terhormat H. Tasrif Siregar dan Ibunda tercinta Hj. Sri Yanti yang telah memberikan banyak hal sampai saat terselesaikannya skripsi ini. Amin.

Wassalamualaikum. Warahmatuallahi Wabarakatuh.

Medan, 12 Agustus 2018

Penulis

Suci Ramadhani Siregar
NPM:1406200413

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan

Lembaran Berita Acara

Kata Pengantar.....i

Daftar Isi..... iv

Abstrak..... vii

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan masalah..... 4

2. Faedah penelitian..... 4

B. Tujuan Penelitian 5

C. Metode Penelitian..... 6

1. Sifat penelitian..... 6

2. Sumber data..... 6

3. Alat pengumpul data..... 7

4. Analisis data..... 8

D. Definisi Operasional..... 8

BAB II:TINJAUAN PUSTAKA..... 10

A. Hukum Perkawinan 10

B. Perlindungan Anak 23

BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 29

- A. Kaitan Hukum Tentang Perkawinan Dibawah Umur Dalam Sistem Hukum Di Indonesia 29
- B. Persintuhan Hukum Perkawinan di Bawah Umur terhadap Perlindungan Anak 38
- C. Faktor dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur 46

BAB IV: PENUTUP..... 69

- A. Kesimpulan 70
- B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

PERSINTUHAN HUKUM PERKAWINAN DIBAWA-AH UMUR TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

SUCI RAMADHANI SIREGAR
NPM:1406200413

Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dengan adanya aturan tersebut jelas telah menjadi tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak, tetapi fakta yang terjadi dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Fakta yang terjadi tersebut menunjukkan adanya persintuhan hukum perkawinan dibawah umur terhadap perlindungan anak dalam sistem hukum diindonesia, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan yang satu dengan aturan yang lain.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang relevan. Data yang digunakan data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, sementara analisis adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur, tetapi kedua peraturan tersebut tidak memiliki sinkronisasi hukum sebagai peraturan perundang-undangan dalam menetapkan batas minimum umur bagi pihak-pihak untuk melakukan perkawinan. Terdapat kesenjangan dan terjadi dilema dengan tidak adanya keseragaman antara aturan yang satu dengan aturan yang lain dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak untuk memperoleh hak nya dalam hal tumbuh dan berkembangnya seorang anak, hal yang demikian itu dapat dilihat dengan adanya aturan dalam Undang-Undang Perkawinan yang memperkenalkan anak laki-laki berusia 19 tahun dan anak-anak yang berjenis kelamin wanita yang berusia 16 Tahun untuk melangsungkan perkawinan sepanjang ada izin dari orangtua dan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan. Perlindungan hukum bagi anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur itu sangat diperlukan, karena akibat dari perkawinan tersebut haknya sebagai anak menjadi terlanggar menurut Undang-Undang Perlindungan Anak “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dan memperoleh perlindungan”.

Kata Kunci: Perkawinan, Dibawah Umur, Perlindungan Anak, Sistem Hukum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan prosesi yang sakral dalam kehidupan manusia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta didalam ayat 2 dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara banyaknya bentuk pernikahan yang terjadi, terdapat fenomena pernikahan dini (pernikahan dibawah umur) dikalangan remaja. Pada hakekatnya pernikahan dini (pernikahan dibawah umur) adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah 18 tahun atau sedang menepuh pendidikan sekolah dan masih termasuk dalam kategori remaja. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih berusia dibawah 18 tahun yakni masih berusia remaja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana dalam peraturan tersebut diperkenannya anak menikah meskipun belum dewasa yang bisa dikenal dengan dispensasi kawin. Pasal 6 ayat 2 menyatakan untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua. Didalam Pasal 7 ayat 1 dinyatakan perkawinan hanya

diizinkan jika pihak pria sudah 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ayat 2 menyatakan dalam hal penyimpangan dari pasal (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Berbicara masalah dispensasi kawin sebagai aturan yang memperkenan anak dibawah umur dapat melangsungkan pernikahan sejalan dengan ketentuan hukum islam yang terkait dengan hukum perkawinan.

Di Indonesia pernikahan dini terbilang tinggi dan mengkhawatirkan. Sebuah sumber mengutip susenas 2012 yang menunjukkan sekitar 11,3% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun dan sekitar 32,10% menikah pada usia 16-18 tahun, sedangkan pada tahun 2014 hasil penelitian BKKBN mengungkap 46% atau setara dengan 2,5 juta pernikahan dini disetiap Indonesia.

Tetapi pada kenyataannya pernikahan dini (pernikahan dibawahumur) sering kali berpotensi pada kasus perceraian, hal ini disebabkan kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah dikarenakan kehamilan diluar nikah. Para pasangan tersebut awalnya tidak menyebutkan bahwa pernikahannya dilatar belakanginya adanya kehamilan diluar nikah, namun seiring berjalannya waktu, fakta-fakta tersebut akhirnya terungkap. Hal ini disebabkan atas ketidaksiapan fisik dan mental para pasangan yang terpaksa menikah karena keadaan tersebut. Selain dari persoalan terjadinya pernikahan dini (pernikahan dibawah umur) ada tanggung jawab dari orang tua seperti yang tertera didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 oint c menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Dengan adanya aturan ini selain si anak sendiri yang mencegahnya orang tua juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegahnya.

Akibat pernikahan dini, selama berumah tangga kedua pasangan tidak memnuhi kewajibannya sebagai suami istri lantas memicu pertengkaran bahkan adanya tindak kekerasan dapat memberikan masalah psikologis yang besar dikemudian hari karena pernikahan tersebut.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gostia mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dan membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Begitu banyak hukum positif di Indonesia melalui beberapa aturan berupa Undang-Undang untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak Indonesia untuk tumbuh dan berkembang serta melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sebagai anak semestinya.

Ketentuan dispensasi kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawina dan pendapat *fuqaha* tersebut kesempatan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, maupun mental dan sosial yang telah dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi. Artinya terdapat persintuhan hukum perkawinan dibawah umur terhadap perlindungan anak dalam sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengangkat proposal skripsi ini dengan judul: **“Persintuhan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”**.

1. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis, dan supaya penulis memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan hasil penelitian dari skripsi ini, maka terlebih dahulu dirumuskan masalahnya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu:

- a. Bagaimana kaitan hukum tentang perkawinan dibawah umur dalam sistem hukum di Indonesia?
- b. Bagaimana persintuhan hukum perkawinan dibawah umur terhadap perlindungan anak?
- c. Apa saja faktor dan dampak perkawinan dibawah umur?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dengan kata lain yang dimaksud dengan faedah teoritis yaitu

faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya, dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, masyarakat dan pembangunan.¹

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep hukum perdata yang berkaitan dengan persintuhan hukum perkawinan dibawah umur terhadap perlindungan anak dalam sistem hukum di Indonesia.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal pembentukan aturan terkait persintuhan hukum perkawinan dibawah umur terhadap perlindungan anak dalam sistem hukum di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kaitan hukum perkawinan dibawah umur dalam sistem hukum di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui persintuhan hukum perkawinan dibawah umur terhadap perlindungan anak.
- c. Untuk mengetahui faktor dan dampak perkawinan dibawah umur.

¹ Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

C. Metode Penelitian

Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, di samping akan menambah ragam pengetahuan lama.² Dalam memecahkan suatu permasalahan dan guna mencari jawaban atas permasalahan tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif guna mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Sifat penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian tersebut cenderung bersifat penelitian deskriptif dengan jenis yuridis normatif³. Penelitian hukum normatif ini adalah Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum yang memiliki arti untuk mengungkapkan kenyataan sejauh mana perundang-undangan tertentu memiliki keserasian yang sederhana mengenai bidang yg sama.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum mengenai persintuhan hukum perkawinan dibawah umur terhadap perlindungan anak dalam sistem hukum diindonesia.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

² Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016, halaman 43.

³ Ida Hanifah. *Op. Cit.*, halaman 6.

- a. Bahan hukum primer yaitu Alquran, Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan-bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

3. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan yang dapat dipertanggungjawabkan maka digunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengutip isi buku yang dibutuhkan, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-Undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.⁴ Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang telah terkumpul.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “persintuhan hukum perkawinan dibawah umur terhadap perlindungan anak dalam sistem hukum di Indonesia” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Persintuhan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur itu adalah hak dan kewajibannyawarga pribadi yang satu dengan warga pribadi yang lainnya. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.
3. Perkawinan di bawah umur adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh seorang lelaki yang belum dewasa dengan seorang perempuan yang juga belum dewasa dan mereka belum siap melaksanakan pernikahan.

⁴ *Ibid.*, halaman. 32

⁵ Ida Hanifah. *Loc. Cit.*

4. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi setiap hak-hak anak yang tertera didalam undang-undang.
5. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum perlindungan terhadap anak yang melangsungkan perkawinan dibawah umur yang dikaitkan dengan hukum perkawinan dibawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perkawinan

Manusia dalam kehidupan yang beradab dan berbudaya, sepanjang hidupnya telah mengenal adanya keluarga sebagai suatu persekutuan terkecil dalam masyarakatnya. Dari persekutuan ini, manusia berkembang menjadi masyarakat yang besar dalam wujud marga, suku dan sebagainya, selanjutnya berkembang menjadi umat dan bangsa-bangsa yang berada di bumi. Hidup menyendiri tanpa pasangan (laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki) adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan tidak alamiah, juga bertentangan dengan ajaran Islam.

وَأَنْكِحُوا الْأَتَمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ □ ٣٢

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (QS. An-Nur: 32).

Menurut Ahmad Zukari, sebagaimana dikutip Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menyatakan secara sederhana perikatan atau perjanjian terjadi jika terdapat kesepakatan antara pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan dengan dasar kemauan atau kesanggupan dan dinyatakan dengan kata-kata atau

sesuatu yang bisa dipahami demikian yang menimbulkan peristiwa hukum yang disebut dengan perjanjian perkawinan.

Perikatan atau perjanjian perkawinan merupakan suatu Undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian perkawinan tersebut yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan isteri. Perjanjian perkawinan antara wanita dan pria sah menurut hukum apabila perjanjian itu dibuat dengan suka rela oleh kedua belah pihak antara suami dan isteri tanpa ada paksaan. Perjanjian itu akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagai sepasang suami isteri. Isteri mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh suami dan suami mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh isteri demikian pula kewajiban diantara keduanya harus berjalan beriringan antara suami dan isteri. Pasangan suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, menghargai, membantu satu sama lain baik secara lahiriah maupun batiniah⁶.

Pengertian nikah itu ada tiga yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lainnya, dan bisa juga disebut secara majaz nikah adalah akad karena denngan adanya akad inilah dipekenankan menggauli, Menurut Abu Hanafiah nikah adalah *wati'* akad bukan *wat'un* (hubungan intim). Kedua secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *wat'un* (hubungan intim), sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam Alquran dan Hadist, antara lain adalah firman

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, halaman 47.

Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima dan unggul menurut golongan syafi'iyah dan Imam Malikiyah, ketiga pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *wati'* karena terkadang nikah diartikan akad dan terkadang diartikan *wat'un* (hubungan intim).⁷

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqih dipakai kata nikah atau perkataan *zawaj*. Kata nikah menurut bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu pengertian sebenarnya dan arti kiasan. Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah *damm* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menurut arti kiasan adalah *wata'* yang berarti mengadakan perjanjian nikah. Dalam kaitannya dengan masalah perkawinan ini para ahli fiqih diantaranya golongan Hanafiyah mengartikan nikah dengan arti bersetubuh. Sedangkan golongan Syafi'iyah mengartikan nikah dengan arti mengadakan perjanjian.⁸

Perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Perkawinan juga merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami istri dan kemudian dengan lahirnya anak, maka menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak-anak mereka.

Menurut Bustanul Arifin sebagaimana dikutip Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menyatakan Hubungan kedudukan yang sama antara suami dan isteri tersebut juga mengandung rasa keadilan,⁹ sehingga terwujud rumah tangga yang bahagia dan kekal selamanya tanpa ada perbedaan kedudukan dalam

⁷ Digilib Uin Sby. "*Bab II Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*". Diakses melalui www.digilib.uinsby.ac.id. Kamis 13 September, Pukul 21:05 Wib, Halaman 3.

⁸ Eprints Walisongo. "Perkawinan Usia Dini dalam Perspektif Undang-undang". Diakses melalui Kamis 13 September, Pukul 21:05 Wib, Halaman 28

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Op.Cit.*, halaman 49.

pergaulan masyarakat dan dalam melakukan perbuatan hukum agar tercapai tujuan perkawinan yaitu untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.¹⁰

Menurut pendapat para ahli lain Soedharyo Saimin menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan materil, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila. Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.¹¹

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat suci dan sakral, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bukan muhrimnya yang diikat dengan adanya ijab qabul yang memperbolehkan terjadinya hubungan suami istri diantara keduanya, dalam Islam ijab qabul sendiri diartikan sebagai adanya penyerahan untuk mengawinkan seorang wanita melalui walinya kepada penerima ijab dengan adanya qabul atau penerimaan dari pihak pria dalam menerima akad yang disampaikan oleh wali wanita tersebut.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ”Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

¹⁰ Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, halaman 47.

¹¹ Djamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”. Lhokseumaweh: Unimal Press. halaman 17-18.

berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut menjelaskan adanya tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sesungguhnya merupakan suatu tujuan yang luhur apalagi dikaitkan dengan Ketuhanan yang Maha Esa, maka hal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan suci yang didasarkan kepada Ketuhanan.

Pembahasan mengenai perkawinan merupakan suatu pembahasan yang penting mengingat makna dari perkawinan adalah sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melangsungkan perkawinan atas dasar keagamaan sehingga perlu diadakannya suatu peraturan khusus yang mengatur masalah perkawinan tersebut, sebagaimana dikatakan oleh R. Abdoel Jamali, “masalah perkawinan ketentuannya secara rinci telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam Undang-Undang itu ditetapkan mengenai perkawinannya sendiri, akibat perkawinan dan tentang perkawinan campuran.”¹²

Perkawinan diartikan “sebagai persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal”.¹³ Patut diketahui perkawinan merupakan suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara.

Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatatan perkawinan untuk dicatatkan, maka

¹² R. Abdoel Jamali. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 157.

¹³ Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 61.

sesungguhnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dari adanya catatan perkawinan yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. sementara Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata sesungguhnya merupakan suatu peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibatnya antara dua pihak yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebagai suami isteri. Menurut pendapat Ali Fandi dalam buku Titik Triwulan Tutik, yang menyatakan bahwa hukum perkawinan dibagi dalam dua bagian yaitu:

1. Hukum perkawinan, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan, misalnya hak dan kewajiban antara suami dan isteri.
2. Hukum kekayaan dalam perkawinan yaitu seluruh peraturan hukum yang berhubungan dengan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan.¹⁴

Terdapat beberapa asas dari adanya hukum perkawinan, dapat dijelaskan asas-asas tersebut yakni sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal.
2. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, perkawinan tidak sah menurut negara jika perkawinan tersebut tidak sah jika ditinjau menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang yang hendak kawin tersebut.
3. Pada prinsipnya berlaku asas monogami, yaitu seorang suami hanya boleh mengawini seorang istri saja, hal ini dapat dikesampingkan bila mana

¹⁴ Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, halaman 97.

seorang suami yang akan mengawini seorang istri lagi, harus memperoleh izin dari istrinya yang pertama.

4. Untuk boleh melakukan perkawinan, Undang-Undang mensyaratkan kematangan jiwa dan raga dari calon mempelai.
5. Perceraian dipersulit.
6. Berlaku prinsip emansipasi antara suami dan istri, sehingga kedudukan suami dan isteri adalah seimbang baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.
7. Perkawinan tidak dipersulit, karena itu keterlibatan pengadilan dalam proses perceraian adalah hanya sekedar untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak suami maupun pihak istri.¹⁵

Indonesia sebagai Negara hukum, yang menjalankan roda pemerintahannya berdasarkan hukum yang telah disepakati, dalam hukum perkawinan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan terkait perkawinan yaitu dalam Undang-undang Perkawinan sebagai peraturan dasar hukum positif Indonesia dalam hal perkawinan, dalam Undang-undang Perkawinan syarat sah perkawinan terdapat beberapa perbedaan dengan rukun nikah yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam Undang-undang Perkawinan syarat sah perkawinan disebutkan dalam Pasal 6 yang terdiri dari beberapa poin yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya

¹⁵ Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. halaman 10.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan syarat sah perkawinan dalam Pasal 6 ayat (6) dengan tegas menyatakan bahwa ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 6 dari ayat (1) sampai dengan ayat (5), berlaku sepanjang hukum agama dan kepercayaan masing-masing dari para pihak tidak menentukan lain, menjadikan syarat sah perkawinan tersebut berbeda dengan syarat sah perkawinan yang dijelaskan sebelumnya yakni terkait rukun dan syarat sah perkawinan sebagaimana yang diperuntukkan oleh umat Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pendapat Sudarsono dalam kutipan sebelumnya. Selain syarat perkawinan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, perkawinan diakui oleh

hukum Indonesia bilamana dibuktikan dengan adanya akta perkawinan, mengingat akta adalah sesuatu alat bukti yang paling otentik dalam pembuktian peristiwa hukum.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan Nasional Indonesia menurut M. Yahya Harahap sebagai berikut :

1. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini menampung di dalamnya segala unsur-unsur ketentuan Hukum Agama dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat yang bersangkutan.
2. Juga asas hukum perkawinan ini sedemikian rupa telah disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman dalam hal ini dimaksud memenuhi aspirasi emansipasi kaum wanita Indonesia di samping perkembangan sosial ekonomis dan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
3. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal
 - a. Suami isteri saling bantu membantu serta saling lengkap melengkapi.
 - b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami isteri harus saling bantu membantu.
 - c. Dan tujuan akhir yang dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.

4. Prinsip yang ke-3 yang menjadi asas undang-undang ini sekaligus menyangkut:
 - a. Kesadaran hukum agama dan keyakinan masing-masing warga Negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
 - b. Juga menurut asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi administratif pemerintahan dengan jalan pencatatan pada catatan yang ditentukan undang-undang artinya sebagai akta resmi yang termuat dalam daftar catatan resmi pemerintah.
5. Undang-undang Perkawinan ini menganut asas monogami, akan tetapi sekalipun dimaksud menganut prinsip ini sama sekali tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan itu, tetapi harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan-persyaratan yang diatur undang-undang ini.
6. Prinsip bahwa perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya. Hal ini memang dapat dilihat manfaatnya menengok kebiasaan yang banyak membawa kesedihan dalam rumah tangga yaitu perkawinan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat yang terdiri dari pribadi yang masih muda.
7. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Pokok prinsip ini dapat dirinci :
 - a. Dalam kehidupan rumah tangga suami isteri sederajat, dan segala sesuatu harus dirundingkan bersama

- b. Isteri berhak mencapai kedudukan sosial di luar lingkungan rumah tangga dan suami tidak dapat melarang hal tersebut
- c. Lebih jauh kalau diperhatikan asas yang disebut pada poin g tersirat suatu penjurusan yang lambat laun akan menuju tendensi sistem kekeluargaan yang bilateral atau parental.¹⁶

Perkawinan sendiri menurut hukum Islam dapat dilangsungkan bilamana telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan, rukun nikah terdiri dari:

1. Calon Mempelai Pria

Adalah seorang pria yang telah dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang menyatakan sudah siap menikah dan siap berumah tangga, adapun syarat untuk calon mempelai pria adalah:

- a) Laki-laki, baligh
- b) Jelas orangnya
- c) Tidak terdapat halangan perkawinan
- d) Beragama islam
- e) Calon mempelai pria tahu betul calon mempelai wanita halal baginya
- f) Tidak karena paksaan
- g) Tidak sedang mempunyai istri empat.

2. Calon mempelai wanita

Adalah seorang wanita yang tidak dalam ikatan menikah dengan lelaki lain, dengan usia yang sesuai peraturan perundang-undangan. Telah siap berumah tangga, adapun syarat untuk mempelai wanita adalah:

- a) Wanita, baligh
- b) Beragama islam
- c) Tidak terdapat halangan perkawinan
- d) Tidak karena paksaan

¹⁶ Repository Usu. "Bab II Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan". Diakses melalui www.Repository.usu.ac.id. Kamis 16 September 2018, Pukul 19:02 Wib. Halaman 33.

3. *Sighat* (akad) ijab qabul

Suatu akad serah terima perkawinan, ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh wali, hakekat ijab sendiri adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah, bentuk pernyataan penawaran dalam ijab berupa *sighat* yaitu susunan kata-kata yang jelas, misalnya ijab perempuan (yang diwakili wali) dengan kata-kata saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama pulan, sementara arti dari qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau ijab calon pengantin perempuan, dengan pernyataan penerimaan berupa *sighat* atau susunan kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima ijab perempuan, misalnya dengan kata-kata berikut yaitu saya terima menikah pulan dengan maskawin X tunai.

4. Wakil/Wali yang menikahkan

Wali sebagai salah satu rukun dari perkawinan juga harus diperhatikan mengingat, wali merupakan pihak yang menjadi orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, wali nikah pun hanya ditetapkan bagi pihak penganten perempuan, adapun yang menjadi syarat wali yaitu:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka.
5. Adil.
6. Tidak sedang ihram/umrah¹⁷.

¹⁷ A. Hamid Sarong. 2010. "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*". Banda Aceh:Pena, halaman 74.

Antara ijab dan qabul serta wali lazimnya, memang harus dipenuhi sebagai salah satu rukun nikah, karena hal tersebut merupakan hal yang urgen, ijab dan qabul sebagai akad serah terima yang pada akhirnya mensyahkan perkawinan tersebut, yang menghalalkan terjadinya persetubuhan antara seorang pria dengan wanita yang bukan muhrimnya, sebaliknya wali turut serta sebagai hal penting untuk terlaksananya perkawinan, karena penyerahan seorang wanita kepada pria yang akan menikahnya dilakukan oleh seorang wali, sehingga wali memiliki posisi yang penting dalam hal akan dilaksanakannya suatu perkawinan.

5. Dua orang saksi

Dalam perkawinan minimal dua orang saksi yang harus memenuhi syarat sebagai saksi yaitu islam, baligh, berakal, merdeka, adil, mendengar dan melihat (tidak bisu), mengerti maksud *ijab qabul*, kuat ingatannya, berakhlak baik, dan tidak sedang menjadi wali. Maka sebagai seorang wali dalam perkawinan haruslah memenuhi syarat yang telah disebutkan sebelumnya, di tengah-tengah masyarakat biasanya ada *naib* yaitu orang yang bertugas atau dapat mewakili kedua calon mempelai pria dan wanita atau mewakili salah seorang atau keduanya dalam akad perkawinan, di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan, thalak dan rujuk, *naib* juga bertugas mendaftar atau mencatat perkawinan, naib sendiri ada di tiap kantor urusan agama yang mana istilah naib sama dengan penghulu, khatib, atau imam.

6. Mahar

Sementara terkait mahar, sesungguhnya merupakan suatu hal yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria kepada mempelai wanita atas dasar

permintaan memperlai wanita dengan cara yang *ma'ruf*, meskipun mahar bukanlah merupakan rukun tetapi hanyalah sebuah kewajiban, mahar sendiri bisa diberikan dalam bentuk uang, pakaian, benda bergerak atau tidak bergerak, bahkan dalam bentuk pelayanan tertentu kepada isteri, misalnya suami memberikan mahar dalam bentuk pelayanan tertentu kepada isteri, misalnya mengajarkan mengaji Alquran bagi isteri dan sebagainya, sepanjang dengan jalan yang *ma'ruf* artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan oleh isteri.

B. Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Dalam setiap masyarakat, pasti akan dijumpai anak. Anak merupakan sosok manusia yang menjadi amanah dari Allah SWT yang menjadi tanggung jawab orang tua dan semua pihak. Anak merupakan bagian dari keluarga. Keluarga merupakan kelompok sosial kecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anaknya yang belum menikah. Keluarga, lazimnya juga disebut rumah tangga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal tersebut mengacu pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai

kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat”.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan secara eksplisit hak anak yang bebas dari diskriminasi yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal yang sama dapat dilihat dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak.

Esensi penting dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, itu merumuskan hak-hak ana atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar. Dapat dikatakan merupakan *primary laws* (norma hukum utama) yang menjadi inspirasi bagi norma hukum dalam Pasal-pasal berikut yang secara teoritis dapat disebut sebagai *secondary laws*. Karenanya hak hidup sebagai hak yang tidak dapat diabaikan dalam keadaan apapun, termasuk situasi darurat (*emergency*).¹⁸

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menyatakan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

¹⁸ Suhasril. 2016. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*”. Depok: Rajawali Pers., halaman 35.

Anak disebutkan diantaranya, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan Diskriminasi, Eksploitasi, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan, Perlakuan salah lainnya.

Berkaitan dengan tanggung jawab perlindungan anak dapat dilihat dari beberapa Pasal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut, Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Kenyataannya di masyarakat masih terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi sehingga memerlukan pelayanan secara khusus seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

1. Anak-anak yang tidak mampu, adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.
2. Anak terlantar, adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
3. Anak-anak yang mengalami masalah kelakuan, adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.
4. Anak-anak yang cacat rohani dan atau jasmani, adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tuanya, yaitu ayah dan ibu kandungnya. Akan tetapi adakalanya seorang anak tidak lagi mempunyai orang tua dan mengakibatkan anak menjadi terlantar. Keadaan terlantar ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal lain seperti kemiskinan atau karena sesuatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya, sehingga hak anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak memperoleh asuhan.
7. Hak memperoleh bantuan.
8. Hak memperoleh pelayanan khusus.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak melindungi sejak dari dalam kandungan”. Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Sedangkan Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Hak perlindungan hukum”. Memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

Menurut Undang-Undang, kekuasaan orang tua terhadap pribadi seorang anak diatur secara otentik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Pasal 298 menegaskan bahwa tiap-tiap anak, dalam umur berapapun juga, wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya. Bapak dan ibunya berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu.

2. Pasal 299 menyebutkan bahwa sepanjang perkawinan bapak dan ibu, tiap-tiap anak sampai menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, selama mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.
3. Adapun Pasal 301 menegaskan bahwa dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam hal pembubaran perkawinan setelah berlangsungnya perpisahan meja dan ranjang, berwajiblah si bapak dan ibu, pun sekiranya mereka tidak memangku kekuasaan orang tua sedangkan tidak pula mereka dibebaskan atau dipecat dari itu, guna keperluan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang belum dewasa, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan atau tiap 3 bulan, menyampaikan tunjangan mereka kepada dewan perwalian sedemikian banyak sebagaimana atas tuntutan dewan pengadilan negeri berkenan menentukannya.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Perkawinan Di bawah Umur Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, dimana perjanjian dalam hal ini bukanlah sembarang perjanjian, tetapi perjanjian dalam pernikahan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita yang mana kesucian tersebut dilihat dari segi keagamaan dari sebuah perkawinan.

Adanya sebuah perkawinan menunjukkan bahwa kedua mempelai bertujuan untuk menjaga kesucian agama tentang hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan ikatan yang suci yakni sebuah perkawinan agar kedua belah pihak tersebut tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama.

Perkawinan yang telah dilangsungkan mengandung aspek akibat hukum, mengingat dengan berlangsungnya sebuah perkawinan maka suami isteri saling dibebankan dengan hak dan kewajiban serta adanya hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan merupakan pelaksanaan agama yang didalamnya terkandung keridhaan Allah SWT. Dimana dengan adanya perkawinan tersebut suami isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan sebuah rumah tangga yang sejahtera, seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai

dengan kemampuannya, dan masing masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum, dimana suami adalah kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Berdasarkan hal yang telah dibahas sebelumnya sesungguhnya dapat diketahui mengenai betapa banyaknya akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan, dimana sdengan adanya perkawinan maka akan timbul hak dan kewajiban anantara suami dan isteri, timbul pula hak dan kewajiban suami isteri untuk bermasyarakat dengan, dan timbul hak bagi masing-masing pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya akibat yang timbul dari sebuah perkawinan juga dapat dilihat dari adanya kewajiban otrang tua untuk mendidik anaka-anak yang terlahir dalam perkawinan tersebut,m adapula klewajiban terkait pengurusan harta perkawinan, dan lain sebagainya.

Mengingat banyaknya akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan, maka diperlukan adanya aturan hukum terkait perkawinan tersebut, dalam sistem hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan, dapat dilihat dari ketentuan Rancangan Undang-undang Perkawinan.

Masalah perkawinan ketentuannya secara rinci telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adanya dispensasi dari Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, maka pihak-pihak yang belum mencapai batasan umur dapat melakukan perkawinan.

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Hakim sebagai penegak hukum dalam hal diminta untuk memberikan penetapan dispensasi kawin harus menyimpangi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, mengingat untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, dan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan.

Adanya sistem hukum Indonesia yang memperkenankan diperbolehkannya anak-anak yang belum mencapai usia perkawinan boleh melangsungkan perkawinan dengan adanya izin dari kedua orang tua dan dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan, menjadi salah satu sebab banyaknya perkawinan anak dibawah umur.

Setiap perkawinan yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perkawinan di bawah umur (pernikahan dini) merupakan praktik perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian. Praktik perkawinan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka, selain usia minimum perkawinan ditetapkan, beberapa negara mengatur cara untuk mengantisipasi masih dimungkinkannya perkawinan seperti itu bisa dilaksanakan, antara lain seperti aturan yang memberikan keringanan (dispensasi).

Dispensasi nikah merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh Pengadilan Agama, berupa produk hukum penetapan kepada calon mempelai yang belum cukup umur, untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi nikah diajukan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan kepada Pengadilan Agama. Kemudian selanjutnya diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terwujudnya tujuan perkawinan.

Hal ini dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang *inheren* dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan. Karena, pemikiran yang bersifat terbuka memungkinkan dispensasi nikah, baik terhadap permohonan orang tua pihak pria maupun wanita, memberi kesan bahwa pernikahan tidak memiliki sakralitas dari aspek ikatannya. Dispensasi nikah berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis, sedangkan usia harus

ditetapkan dengan konsekuensi sanksi yang tegas, agar melalui ketegasan ini dapat mengeleminasi kemungkinan konflik dalam kehidupan rumah tangga kelak.

Menurut Peunoh Dalay, bahwa untuk memperkecil pintu pemberian izin nikah dan dispensasi nikah, maka eksekutif dalam hal ini Kementrian Agama seharusnya membuat peraturan untuk memperkecil dan memperketat syarat-syarat pemberian izin nikah, dan usia nikah wanita harus lebih dari 16 tahun. Demikian, pula pencatatan nikah terhadap seorang pria ketika ia telah menunjukkan bukti bahwa ia mempunyai pekerjaan dan sumber penghasilan. Praktik, disepnesasi nikah menurut beberapa pendapat yang berkembang sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terksean “menggampangkan” proses perkawinan tanpa mempertimbangkan keharmonisan hidup keluarga kelak dimasa-masa mendatang¹⁹.

Selain tidak sejalan dengan batas usia minimal pernikahan, dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur juga tidak sesuai dengan asas-asas pernikahan. Beberapa asas pernikahan banyak diungkapkan oleh para pakar, dengan demikian bahasan tentang asas-asas pernikahan dapat diserap dari berbagai referensi. Hal ini disebabkan karna bahasan ini termasuk kajian fiqih yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Setelah menginduksi dari beberapa referensi, adapun penerapan asas-asas hukum pernikahan dalam dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur:

¹⁹ H. Amran Suadi. 2018. “*Aspek Perlindungan Anak Indonesia*”. Jakarta: Kencana. halaman 115-117

1. Asas Sukarela

Asas sukarela atau persetujuan serta tidak dipaksa (*ikhtiyar*), merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya *khitbah* atau peminangan yang merupakan satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak dapat mempertimbangkan apa yang mereka lakukan.

Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan yang dari calon istri, mengingat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya dia, kemudian bila tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis. Dengan demikian, dapat digambarkan secara tegas, bahwa penerapan asas sukarela dalam dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur pada dasarnya dapat terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan pada persidangan dispensasi nikah di Pengadilan Agama tetap menghadirkan calon mempelai tersebut dan kehadiran orang tua hanya sebagai wali nikah karena anak-anak tersebut belum cakap bertindak hukum. Melakukan pemaksaan dalam pernikahan berarti merampas kemerdekaan seseorang dan melanggar hak asasi manusia, sehingga secara hukum pernikahan tersebut dapat dibatalkan.

2. Asas Perkawinan Untuk Selamanya

Tujuan pernikahan antara lain untuk mendapat keturunan dan untuk ketenangan, kententraman, dan cinta serta kasih sayang. Kesemua ini dapat

dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk segalanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam hukum islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah memilih terlebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami dan istri.

Karena asas dalam hukum perkawinan islam itu untuk selamanya, dan bukan untuk suatu masa tertentu saja. Maka islam tidak membenarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Akad nikah yang mengandung ketentuan pembatasan waktu kawinan.
- b. Nikah Mut'at atau kawin kontrak, nikah ini disebut juga *ziwaj mua'at* dan *ziwaj muntaqi*, yaitu nikah yang ditentukan untuk suatu waktu tertentu, atau perkawinan yang terputuskan.
- c. Nikah Muhallil, yaitu nikah yang dilakukan oleh seorang terhadap wanita yang telah diceraikannya tiga kali oleh suaminya yang pertama setelah masa iddah nya selesai. Oleh suami kedua wanita itu dikumpuli dan diceraikan agak bisa kembali dan kawin kali dengan suaminya pertama. Didalam pernikahan ini ada unsur perencanaan dan niat bukan untuk selamanya.
- d. Nikah Syighar, yaitu seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki itu mengawinkan putrinya dengan si wali tanpa membayar mahar.

Penerapan dispensasi ini terhadap anak dibawah umur tidak ada halangan dan tidak ada pengecualian sehingga berlaku secara konsisten, meskipun pernikahannya dibawah umur namun harus sesuai dengan hukum islam.

3. Asas Suami Sebagai Kepala Keluarga

Dalam hukum islam, tidak selamanya wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Adakalanya wanita lebih besar hak dan kewajibannya dari pria dan adakalanya pria lebih besar hak dan kewajibannya dari wanita. Dalam perkawinan, seorang pria dan wanita harus merelakan haknya masing-masing dan menanggung kewajiban baru, disamping mendapatkan hak-hak baru dari masing-masing pihak.

Dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur tidak menyimpang dari asas ini, karena dalam dispensasi nikah suami tetap sebagai kepala keluarga. Sekalipun suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan, namun menurut ketentuan hukum islam, suami mempunyai kedudukan lebih dari istri.

4. Asas Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama

Perkawinan adalah Sunnah Nabi Muhammad SAW hal itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan ajaran agama. Agama menepatkan pernikahan sebagai sesuatu yang penting dalam struktur ibadah, sehingga pernikahan termasuk dalam dua bentuk ibadah sekaligus yaitu *mahdah* dan *ghairu mahdah*.

Pernikahan atas dasar dispensasi nikan terhadap anak dibawah umur, pada prinsipnya adalah untuk memenuhi dan melaksanakan perintah agama, bahkan lebih dari itu, dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur dilakukan untuk

menjaga kedua mempelai tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Berdasarkan hal tersebut, asas memenuhi dan melaksanakan perintah agama tidak bertentangan dengan dispensasi pernikahan anak dibawah umur.

5. Asas Kematangan Calon Mempelai

Terkait dengan usia dewasa, usia itu sangat menitikberatkan pada segi kesehatan, kematangan biologis sehingga sebaiknya usia pria minimal 21 tahun dan wanita 20 tahun karena usia ini dipandang memasuki tahap awal.

Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam pernikahan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga, dimana hal itu menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga karena pasangan suami istri tidak akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka mencapai usia dewasa.

Berdasarkan kehendak dari asas-asas pernikahan tersebut, jelaslah bahwa pernikahan anak di bawah umur merupakan hal yang tidak sejalan dengan prinsip kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Oleh karena itu hanya diperbolehkan pada kasus tertentu dan diberikan dengan cara tertentu melalui dispensasi nikah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, disertai oleh alasan tertentu pula, yaitu adanya klausul lebih baik untuk dilaksanakan , dan kalau tidak dilaksanakan akan muncul mudarat yang lebih besar²⁰.

²⁰ *Ibid.*, halaman 121-132

B. Persintuhan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia

Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal perkawinan seperti mengenai batas-batas umur perkawinan (syarat-syarat perkawinan) pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di bawah umur atau dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan usia perkawinan, paling tidak laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun.

Di Indonesia, persentase pernikahan dini di Indonesia terbilang tinggi dan mengkhawatirkan. Sebuah sumber mengutip data susenas 2012 yang mnunjukkan sekitar 11,13% anak perempuan menikah pada usia 10-15 tahun dan sekitar 32,10% menikah pada usia 16-18 tahun, sedangkan tahun 2014, hasil penelitian BKKBN mengungkap 46% atau setara dengan 2,5 juta pernikahan disetiap tahun di Indonesia terdiri dari mempelai perempuan berusia 15 sampai 19 tahun.²¹

Pencegahan perkawinan di bawah umur diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, di dalam pasal tersebut dimaksudkan bahwa perkawinan di bawah umur kurang memberi jaminan kebahagiaan, sehingga tak jarang didapati suatu perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Hal itu terjadi karena disamping belum adanya kematangan berpikir kedua belah

²¹ Lauma Kiwe. 2017. *"Mencegah Pernikahan Dini"*. Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, halaman 14.

pihak, juga biasanya disebabkan oleh tidak adanya persetujuan terlebih dahulu dari calon suami istri.

Permasalahan seperti tersebut jelas tidak sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya perkawinan di bawah umur pun dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-Undang Perkawinan masih memberikan kemungkinan penyimpangannya, yaitu dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Penyimpangan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) tidak dijelaskan dalam pasal tersebut maupun dalam Penjelasan Undang-Undang Perkawinan, karena dengan tidak disebutkannya suatu alasan yang penting itu, maka dengan mudah saja setiap orang mendapatkan dispensasi tersebut.

Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai instrumen Hak Asasi Manusia tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum untuk kawin selain menegaskan definisi anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun apabila dikaji maka secara tidak langsung Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa batas usia minimum seseorang untuk bisa kawin adalah minimal pada saat berumur 18 tahun atau lebih.

Pasal 26 ayat (1) point c Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Pada perspektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa kawin dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan merampas hak-haknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa.

Penjelasan tersebut menurut penulis antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak sama-sama tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur, tetapi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak sesuai atau tidak memiliki sinkronisasi hukum sebagai peraturan perundang-undangan dalam menetapkan batas minimum umur bagi pihak-pihak untuk melakukan perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas minimum umur dalam melakukan perkawinan dibedakan antara laki-laki dan perempuan, yaitu laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Hal ini menurut pemerhati perempuan yaitu Misiyah mengatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945, karena itu merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Oleh sebab itu, menurut beliau sudah waktunya Undang-Undang Perkawinan direvisi dengan menaikkan

umur pada perkawinan yaitu setara dengan laki-laki 21 (dua puluh satu) tahun atau minimal diatas 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.²²

Berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya maka sesungguhnya pemerintah Indonesia turut serta dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak melalui berbagai macam peraturan yang dikeluarkan sebagaimana adanya Undang-undang Perlindungan Anak yang dengan tegas menyatakan bahwa anak-anak memiliki hak untuk bermain, tumbuh dan berkembang, dan orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan, hal yang demikian itu menunjukkan bahwa Sistem Hukum Indonesia tidak menghendaki adanya hak-hak anak yang dirampas untuk tidak bermain dan tumbuh serta berkembang.

Anak dalam sistem hukum Indonesia juga selalu berkaitan dengan usia dari anak itu sendiri, dimana dalam tiap-tiap peraturan hukum yang ada di Indonesia mengenai batas usia yang ditetapkan untuk menetapkan seseorang tersebut sebagai anak dalam masing-masing aturan memiliki batas usia yang beraneka ragam. Dalam Undang-undang Perkawinan seorang yang dikatakan anak yang ingin melaksanakan perkawinan dan harus mendapat izin dari orang tua adalah anak laki-laki yang berusia 19 Tahun dan perempuan berusia 16 Tahun, hal yang demikian itu berbeda dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

²² <http://news.bisnis.com/read/20141030/16/269082/perkawinan-di-bawah-umur-pasal-di-uu-no.11974-berpotensi-langgar-konstitusi>, diakses, tanggal, 30 November 2014, pukul 23:05 WIB.

Sedangkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi secara tidak langsung Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menentukan batasan umur baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk melakukan perkawinan yaitu minimal diatas 18 (delapan belas) tahun. Berangkat dari ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perlindungan anak, maka untuk melangsungkan perkawinan selayaknya dilaksanakan diatas usia 18 tahun agar terpenuhi upaya sistem hukum Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak anak.

Terdapat kesenjangan dan terjadi dilema dengan tidak adanya keseragaman antara aturan yang satu dengan aturan yang lain dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak untuk memperoleh hak nya dalam hal tumbuh dan berkembangnya seorang anak, hal yang demikian itu dapat dilihat dengan adanya aturan dalam Undang-undang Perkawinan yang memperbolehkan anak laki-laki berusia 19 tahun dan anak-anak yang berjenis kelamin wanita yang berusia 16 Tahun untuk melangsungkan perkawinan sepanjang ada izin dari orang tua dan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yakni dengan adanya dispensasi dari pengadilan, memberikan celah bagi para pihak yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur dengan diperkenankannya meminta dispensasi kawin, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak melarang secara tegas untuk terjadinya perkawinan di bawah umur sebagaimana

ditetapkan dalam Pasal 26 ayat (1) point c Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang melakukan perkawinan di bawah umur itu sangat diperlukan, karena akibat dari perkawinan tersebut haknya sebagai anak menjadi terlanggar menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dan memperoleh perlindungan”. Serta adanya resiko yang menyebabkan kematian pada anak seperti yang dikatakan oleh Konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi menerangkan bahwa terjadi resiko penyakit dan kelainan terutama pada saat kehamilan muda. “ Karena secara biologis perempuan di bawah usia 20 tahun belum siap, sehingga risikonya sangat tinggi bagi ibu dan bayi”.

Perlindungan yang paling dekat berasal dari orang tua. Orang tua wajib melindungi anaknya dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan lainnya. Selain itu dengan adanya perkawinan di bawah umur maka perlindungan orang tua yang tulus dan sejati menjadi berkurang. Anak seharusnya dilindungi dari perkawinan di bawah umur yang berdampak pada perkembangannya, baik secara fisik maupun psikis.

Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menerapkan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur, baik secara langsung maupun tidak langsung telah melanggar hak-hak anak.

Pihak yang tidak langsung yaitu seperti pihak yang mengetahui ataupun dengan sengaja membiarkan anak tersebut dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi maupun seksual maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000., Pihak langsung yang terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau denda paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Selain kedua pasal tersebut Undang-Undang Perlindungan Anak sudah memuat ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dalam permasalahan perkawinan di bawah umur, termuat dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan bujuk rayu, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, maka dapat dijerat pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda balik banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Tampaklah bahwa dari aspek hukum, perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang, terutama terkait ketentuan batas umur untuk kawin. Dari persepektif gender, perkawinan di bawah umur merupakan bentuk ketidakadilan gender yang dialami perempuan akibat kuat

berakarnya budaya patriarki pada masyarakat yang menganggap perempuan sebagai barang dan selalu berada di bawah subordinasi.

Berdasarkan hal yang demikian itu maka diketahui kaitan hukum perkawinan dibawah umur terhadap perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia, merupakan suatu hal yang saling berkaitan dimana secara tidak langsung hukum perkawinan Indonesia tidak mengimnginkan adanya hak-hak anak yang dilanggar dalam pelaksanaan perkawinan, mengingat dalam Undang-undang Perkawinan menetapkan batas minimal usia bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan, dimana untuk calon mempelai wanita minimal berusia 16 Tahun dan pria minimal 19 tahun artinya bahwa Undang-undang memberikan perlindungan bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang, hanya anak-anak yang berusia 16 Tahun bagi wanita dan 19 Tahun bagi pria yang boleh melangsungkan perkawinan, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Perlindungan anak yang menjamin hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaa, sehingga bilamana ada anak yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur yang dipersyaratkan oleh Undang-undang harus mendapat izin dari Pengadilan yang bersangkutan, dan dalam hal yang demikian itu hakim yang akan menetapkan perkawinan di usia anak-anak tersebut diperkenankan atau tidak.

C. Faktor Dan Dampak Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan adalah salah satu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan menurut penulis juga merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal dimana manusia dapat beranak, berkembang biak melestarikan kehidupannya. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang tidak akan menjadi sempurna dan lebih dari itu menyalahi fitrahnya sebagai manusia, karena Allah SWT telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan.

Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahha Esa, sehingga untuk terwujudnya tujuan perkawinan yang demikian itu maka sepatutnya para pihak yang melangsungkan perkawinan adalah para pihak yang telah matang jiwa raganya, mengingat jika pihak yang melangsungkan perkawinan adalah anak yang belum cukup umur maka perkawinan itu akan dijalankan oleh anak-anak yang masih dalam masa tumbuh dan berkembang, yang diatutkan tidak siapnya mental anak-anak tersebut dalam menjalani hidup rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian, sehingga hal yang demikian itu seharusnya tidak terjadi.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan

dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan sosial secara utuh kepada anak itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam hal, diantaranya dengan adanya sebuah Undang-undang Perlindungan Anak yang dengan tegas menyatakan bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, maka setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang tanpa terkecuali. Demikian pula orang tua memiliki tanggung jawab untuk tercapainya pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Pasal 28 B ayat (2) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengenai hak atas anak menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang,serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Regulasi telah mengatur tentang persyaratan administratif dan substantif tentang perkawinan, termasuk batasan minimal usia para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian masih banyak ditemukan perkawinan di bawah umur atau perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak yang belum memenuhi persyaratan batasan minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan dilaksanakan oleh dua mempelai setelah memenuhi serangkaian prosedur administrasi untuk mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan.

Penggunaan istilah perkawinan di bawah umur dipahami secara *contrario* (*mukhalafah*) terhadap ketentuan batasan usia perkawinan. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa usia perkawinan adalah usia atau

umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan.²³ Perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang umurnya belum mencapai batasan usia perkawinan inilah yang disebut dengan perkawinan di bawah umur.

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi batasan usia perkawinan. Rasulullah Muhammad Saw. Memerintahkan agar seseorang menikah ketika ia telah mencapai keadaan *alba'ah* (mampu):

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)) .

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud ra. Berkata Rasulullah Saw Bersabda Hai para pemuda, siapa di antara kamu telah mampu maka hendaklah menikah, karena menikah itu lebih dapat memejamkan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang belum mampu hendaklah puasa karena Sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya (HR. Muslim)*

Hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah umur dengan persyaratan yang sangat ketat, dan yang menjadi pertimbangan utama adalah kemaslahatan yang terbaik bagi dua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Kemaslahatan yang dimaksudkan itu sendiri maknanya bahwa perkawinan yang dilangsungkan tersebut merupakan hal terbaik bagi kedua calon mempelai.

²³ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, *Ijma' Ulama*, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta, Halaman. 228.

Perkawinan di bawah umur atau perkawinan terjadi di masyarakat karena disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal dua calon mempelai dan keluarganya, juga faktor eksternal yang datang dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Dispensasi perkawinan yang diatur dalam regulasi juga merupakan suatu penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur, mengingat dengan adanya dispensasi kawin maka terbuka peluang untuk terlaksananya perkawinan dibawah umur.

Pengaturan mengenai dispensasi kawin adalah mencakup semua ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan yang didalamnya termasuk kedudukan orang tua dan wali. Hal yang demikian itulah menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur.²⁴ Perkawinan di bawah umur, secara normatif jelas melanggar ketentuan undang-undang perlindungan anak meskipun telah mendapatkan izin dispensasi perkawinan dari pengadilan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu:

a. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi. Disamping itu, masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan

²⁴ Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009. "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*". Yogyakarta: UI Press, halaman 17.

tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik

b. Orang tua

Pada sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, karena ingin melanggengkan hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya rekan kerja orang tua, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.

c. Kecelakaan (*married by accident*)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia.

d. Karena tradisi dikeluarga

Kebiasaan nikah usia dini pada keluarga dikarenakan agar tidak dikatakan perawan tua, pada beberapa keluarga tertentu, dapat dilihat ada yang memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda, dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga yang menganut kebiasaan ini, biasanya didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah *mumayyis* (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat dan mejerumsukan dalam hubungan zina. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik keluarga dan merusak martabat orang tua dan keluarga. Walaupun didalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua dan keluarga mencegah perkawinan dibawah umur, Undang-Undang Perkawinan memberikan dispensasi kepada kedua pasangan yang belum cukup usia untuk bisa melakukan pernikahan. Dengan berbagai sebab atas pertimbangan hukum dimuka persidangan.

e. Karena kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah presentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya keyakinan bahwa tidak boleh menolak

pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelekan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.²⁵ Terdapat juga pada sebagian masyarakat adat di Indonesia yang menikahkan anaknya diusia dini untuk menghindari terjadinya fitnah bagi kedua pasangan yang sedang berpacaran, hal yang sama juga terjadi dideda atau pada beberapa daerah di Indonesia yang adat istiadatnya yang terkenal dengan pernikahan siri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari.

Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, banyak membantu pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur atau paling tidak ikut meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur. Meskipun demikian undang-undang ini juga memberikan peluang munculnya perkawinan di bawah umur dengan prosedur yang cukup selektif, yaitu harus melalui mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi perkawinan.

Hak anak merupakan berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

²⁵ Journal Stain Kudus. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya". Diakses melalui Kamis 20 September, pukul 14:02 Wib. Halaman.17.

dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan ketentuan Pasal 4

2. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1).
3. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 11.
4. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1.

Memperhatikan uraian tersebut nampak jelas bahwa perkawinan di bawah umur akan berpotensi menimbulkan berbagai hal yang bisa berdampak buruk terhadap calon mempelai dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah umur tersebut. Kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohaniyah, jasmaniah maupun sosialnya.

Dampak lain yang timbul dengan adanya perkawinan dibawah umur yang telah diberikan dispensasi kawinnya oleh Pengadilan, menjadikan anak-anak yang

lainnya yang berniat untuk kawin dibawah umur menjadi semakin gencar dengan adanya dispensasi tersebut, anak-anak tersebut akan menganggap bahwa untuk melangsungkan perkawinan cukup dengan minta izin kepada kedua orang tua, dan memintanya untuk meminta dispensasi ke Pengadilan, sehingga hal yang demikian itu menjadi salah satu penyebab semakin tingginya angka perkawinan dibawah umur.

Implikasi praktis dari perkawinan anak di bawah umur berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya anak secara wajar. Orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan apabila dirasa perkawinan tersebut justru akan mengakibatkan hal-hal negatif bagi calon mempelai. Orang tua memikul tanggungjawab sepenuhnya atas segala akibat negatif dari perkawinan anak-anaknya. Kewajiban orang tua ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Selanjutnya Pasal 26 ayat (2) menyatakan dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan tanggungjawabnya, kewajiban dan

tanggungjawab sebagaimana dimaksud apada ayat 1 dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut dapat diketahui betapa orang tua merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan amanat Undang-undang Perlindungan Anak untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 288 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak khususnya wanita yang karena sesuatu hal terikat dengan perkawinan. Perlindungan hukum ini tercermin dari adanya sanksi pidana bagi seseorang yang bersetubuh dengan wanita di bawah umur.

Pasal 3 Undang-Undang perlindungan Anak dinyatakan bahwa “ tujuan perlindungan anak adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”. Dengan kata lain bahwa disusunnya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin tewujudnya kehidupan yang ideal bagi anak dan bukan untuk melegitimasi kehendak anak yang tidak wajar, seperti keinginan untuk segera menikah di usia anak-anak. Dasar pertimbangan disahkannya undang-undang perlindungan anak yang di antaranya adalah bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsunganeksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu

mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Oleh karena itu, perkawinan anak di bawah umur harus dihindari dan merupakan jalan alternatif terakhir.

Penentuan usia perkawinan seperti yang diatur dalam undang-undang perkawinan sejatinya didasarkan pada metode *maslahatal-mursalah*, yakni masalah yang secara eksplisit tidak terdapat satupun dalil baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Karena ketentuan batasan umur perkawinan ini bersifat *ijtihadi*, yang kebenarannya relatif maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku, artinya ketentuan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan bisa saja dilanggar dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat. Namun secara prosedur administratif pelanggaran batas usia kawin tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan.²⁶ Hal ini selain untuk legalisasi terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan, juga untuk menguji kebenaran alasan-alasan yang disampaikan.

Memperhatikan berbagai dampak negatif yang kemungkinan ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur maka solusi alternatif yang ditawarkan adalah menghindari terjadinya perkawinan di bawah umur. Upaya yang ditempuh di antaranya adalah sosialisasi hukum secara efektif tentang hukum perkawinan dan berbagai produk hukum yang relevan khususnya regulasi tentang perlindungan dan kesejahteraan anak. Apabila mempelai wanita dan atau mempelai laki-laki tetap melangsungkan perkawinan dan usia mereka belum mencapai umur 21 tahun

²⁶ Suma. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Halaman. 443.

maka harus ada jaminan untuk dapat dipenuhi secara optimal terhadap kesejahteraan mereka baik lahiriyah maupun bathiniyah. Apabila tidak ada yang memberikan jaminan maka harus dicegah terjadinya perkawinan di bawah umur.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya mengatur tentang perkawinan, tetapi juga mengatur masalah hukum yang termasuk dalam lapangan hukum keluarga, seperti hubungan harta benda (kekayaan) antara suami isteri dalam perkawinan, kedudukan anak dalam keluarga, hubungan hukum antara orang tua dengan anak (hak dan kewajiban orang tua terhadap anak) dan termasuk pula masalah perwalian. Seperti yang dikatakan Subekti, bahwa hukum kekeluargaan adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan dan hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri (Subekti 1994: 16).

Khusus terkait dengan anak, maka akibat perkawinan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak secara timbal balik, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974. Adapun hubungan hukum antara orang tua dan anak, sebagai berikut:

- a. kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, bahkan kewajiban ini berlaku terus walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus.

- b. anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

- c. jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya, jika mereka memerlukan bantuan.
- d. anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- e. orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- f. orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali jika kepentingan anak itu menghendaki.
- g. salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkelakuan buruk sekali; dan walaupun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut²⁷.

Terdapat dua dampak dari pernikahan dini, yaitu:

²⁷ <http://publikasiilmiah.umsu.ac.id> Atiakah Rahmi, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010", De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, halaman 275.

1. Dampak positif

- a. Mencegah kemaksiatan, seperti terjadinya perzinahan atau kumpul kebo di kalangan remaja, dengan menikah kan anaknya orang tua akan merasa tenang, karena perzinahan atau bahkan hamil diluar nikah di kalangan remaja tidak akan terjadi.

2. Dampak negatif

a. Dampak terhadap pasangan suami istri

Terkadang anak yang menikah di usia dini tidak bisa memenuhi atau bahkan tidak tahu sebenarnya apa saja hak dan kewajibannya sebagai suami istri itu, ketidaktahuan ini di sebabkan karena mental dan fisik yang belum matang dan belum benar-benar siap untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan, akibatnya masing-masing pihak ingin menang sendiri dan pertengkaran pun tidak dapat di hindari.

b. Dampak terhadap masing-masing keluarganya

Pernikahan yang dilakukan anak-anak yang masih di bawah umur, mereka masih mempunyai sifat kekanak-kanakan dimana mereka belum bisa mandiri dalam mengurus kehidupan keluarganya. Biasanya mereka yang melakukan pernikahan dini itu masih ikut dengan orang tua, masih tinggal dengan orang tuanya sehingga mereka tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Ketika terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka, maka orang tua masing-masing akan ikut campur dalam menyelesaikan masalah nya. Nah hal inilah yang akan mengurangi keharmonisan antar keluarga masing-masing.

c. Dampak terhadap anak-anaknya

Tidaklah mudah untuk menjalankan pernikahan di usia muda, terutama bagi wanita yang melangsungkan pernikahan di bawah umur 20 tahun apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya, selain itu rentan perceraian di dalam pernikahan dini. Mengapa? Karena seringkali pertengkaran ataupun perselisihan itu berujung perceraian. Dan biasanya sebelum terjadi perceraian anak sudah lahir, hingga kemudian anak itu di titipkan untuk sementara waktu ataupun selamanya kepada nenek dan kakeknya atau saudara ayah dan ibunya²⁸.

Pernikahan usia muda juga memiliki implikasi bagi kesejahteraan keluarga dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Bagi perempuan yang tidak berkepentingan dan tidak siap menjalankan perannya sebagai ibu yang bisa memberikan sumbangannya bagi masyarakat terdapat biaya yang harus dibayar di setiap tingkat, mulai dari tingkat individual, keluarga, sampai kepada bangsa keseluruhan.

1. Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak serta Gangguan Kesehatan Lainnya
Tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan di suatu negara menyumbangkan pada rendahnya indeks pembangunan manusia di suatu negara yang disebabkan antara lain oleh kasus-kasus pernikahan usia muda. Indikator Sosial Wanita Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tahun 1995 menyebutkan 21,75 persen anak perempuan di perkotaan menikah pada usia di bawah 16 tahun dan 47,79 persen di kawasan pedesaan. Penelitian menunjukan

²⁸ <https://www.kompasiana.com/05vina/5a2bb854caf7db283f41e2d4/faktor-dan-dampak-pernikahan-dini-apa-sajakah-itu?page=all>

bahwa ibu di bawah umur lebih cenderung melahirkan anak yang cacat atau adanya gangguan kesehatan. Ibu yang melahirkan di bawah usia 18 tahun memiliki resiko 60 persen lebih besar kematian bayi. Penelitian UNICEF tahun 2007 menunjukkan bahwa ibu yang melahirkan di bawah umur 18 tahun memiliki keahlian mengasuh bayi atau anak yang rendah sehingga seringkali memutuskan keputusan-keputusan yang salah untuk bayi mereka.

Perkawinan anak-anak telah berulang kali dilakukan penelitian oleh berbagai organisasi internasional seperti ICRW dan UNICEF tentang bahaya perkawinan anak-anak. Beberapa persoalan yang dikemukakan adalah risiko kesehatan anak-anak yang dinikahkan di bawah umur, misalnya UNICEF melaporkan pada tahun 2001 anak-anak yang hamil di bawah umur cenderung melahirkan bayi prematur, komplikasi melahirkan bayi kurang gizi serta kematian ibu dan bayi lebih tinggi. Ibu usia di bawah 15 tahun lima kali mengandung resiko pendarahan, serta kesulitan melahirkan. Kematian ibu di kalangan usia bawah diestimasikan dua kali hingga lima kali lebih banyak dari ibu berusia dewasa. Gangguan kesehatan bisa terjadi karena ibu terlalu muda, terlalu banyak atau terlalu sering melahirkan. Seorang remaja dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga dapat membahayakan proses persalinan. Pada tahap remaja, seorang anak sedang mengalami pertumbuhan. Bila ia juga harus mengandung janin yang sedang tumbuh maka akan terjadi perebutan dalam perkembangan sehingga walaupun mungkin selamat namun kualitas anak yang dilahirkan remaja tentu akan berbeda dengan yang dilahirkan

oleh perempuan dewasa yang memang sudah siap untuk melahirkan.

2. Penyakit HIV

Anak yang dinikahkan di usia muda, menurut penelitian Barua pada tahun 2007 mengandung resiko terhadap penyakit kelamin dan juga HIV atau AIDS lebih besar. Anak-anak yang dinikahkan pada usia muda tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi dalam kehidupan perkawinannya. Anak-anak tersebut tidak kuasa menolak hubungan seks yang dipaksakan oleh suami mereka dan tidak memiliki cukup pengetahuan tentang kontrasepsi dan juga bahaya penyakit seksual. Akibatnya, mereka tidak dapat bernegosiasi soal hubungan seks yang aman (safe sex). Anak-anak perempuan yang dinikahkan di usia muda mudah mengidap penyakit HIV atau AIDS karena vagina mereka masih belum sempurna dan sel-sel yang melindunginya masih belum kuat sehingga mudah terluka. Penelitian Barua menunjukkan bahaya ketularan HIV atau AIDS pada pengantin anak-anak sangat mengkhawatirkan.

3. Kanker Leher Rahim

Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang sehingga bila terpapar Human Papiloma Virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker. Leher rahim memiliki dua lapis epitel, epitel skuamosa dan epitel kolumnar. Pada sambungan kedua epitel terjadi pertumbuhan yang aktif, terutama pada usia muda. Epitel kolumnar akan berubah menjadi epitel skuamosa. Perubahannya disebut metaplasia. Kalau ada HPV menempel, perubahan menyimpang menjadi displasia yang merupakan awal dari kanker. Pada usia di

atas 20 tahun, sel-sel sudah matang, sehingga resiko semakin kecil. Gejala awal perlu diwaspadai, keputihan yang berbau, gatal serta perdarahan setelah berhubungan intim. Jika diketahui pada stadium sangat dini atau prakanker, kanker leher rahim bisa diatasi secara total. Untuk itu perempuan yang aktif secara seksual dianjurkan melakukan tes Papsmear 2-3 tahun sekali.

4. Neoritis Deperesi

Depresi berat atau neoritis depresi akibat pernikahan usia muda ini, dapat terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang schizoprenia atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila. Sedang depresi berat pada pribadi extrovert (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya seperti perang piring, anak dicekik dan sebagainya. Dengan kata lain, secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya. Dalam pernikahan di usia yang masih muda sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi prevensi daripada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah bila telah mempunyai anak. Begitu punya anak, kehidupan rumah tangga akan berubah dan tanggung jawab meningkat. Bila berdua tanpa anak, mereka masih bisa enjoy, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa

menikmati masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam tali pernikahan.

Pada usia yang terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasarkan emosi atau mungkin mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Meski tak terjadi *Married By Accident (MBA)* atau menikah karena “kecelakaan”, kehidupan pernikahan pasti berpengaruh besar pada remaja. Oleh karena itu, setelah dinikahkan remaja tersebut jangan dilepas begitu saja.

5. Pernikahan yang Tidak Berkekuatan Hukum.

Dalam Pasal 20 dan 21 UU No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa pegawai pencatat pernikahan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui antara lain adanya pelanggaran dari ketentuan batas umur minimum pernikahan. Oleh karena itu, apabila pasangan mempelai dan juga keluarga tidak keberatan maka tindakan yang paling mungkin dilakukan adalah tidak mencatatkan pernikahannya di hadapan Kantor Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil). Pernikahan yang tidak tercatat di lembaga pencatat nikah adalah pernikahan yang tidak berkekuatan hukum, meskipun mungkin dapat disebut sah menurut keyakinan agama masing-masing pasangan. Untuk pernikahan yang tidak tercatat seperti ini, pihak yang mengalami kerugian utama adalah pihak istri dan anak-anak yang dilahirkannya karena bila tidak memiliki dokumen pernikahan, seperti surat nikah, maka ia akan kesulitan menuntut hak-haknya selaku istri terkait dengan masalah perceraian, kewarisan, tunjangan keluarga, dan lain-lain.

6. Munculnya Pekerja Anak

Para kaum muda Indonesia yang menikah dan putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pada umumnya cenderung berpenghasilan rendah. Selain itu mereka juga rentan terhadap pengangguran, atau bekerja di bidang pekerjaan yang kurang aman dan pasti (tanpa kontrak). Dari survei terbaru Organisasi Perburuhan Internasional atau International Labour Organization (ILO), yang menelaah kondisi ketenagakerjaan anak muda di Indonesia, semakin muda usia putus sekolah, semakin tinggi persentase terjebak dalam pengangguran dan kemungkinan berhasil dalam dunia kerjanya rendah karena tidak berpendidikan, berkecakupan rendah, serta tidak memiliki kecakapan kerja. Hal ini merupakan bukti, adanya sebuah kebutuhan untuk tidak membiarkan anak-anak di bawah umur untuk bekerja atau masuk dalam angkatan kerja. Anak-anak pada usia tersebut harus tetap berada di sekolah untuk menuntut ilmu karena anak yang putus sekolah dan masuk dalam dunia kerja walaupun dapat membantu perekonomian keluarga, namun hanya untuk sementara saja. Oleh karena itu, pendidikan dan kesempatan pelatihan yang luas bagi orang muda tidak hanya sekedar membantu para anak muda saja. Namun, akan menjadi investasi yang efektif bagi masa depan ekonomi Indonesia. Kaum muda yang putus sekolah untuk bekerja juga cenderung untuk menikah dan memiliki anak pertama rata-rata dua tahun lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang menyelesaikan pendidikan dasar. Pernikahan dan kelahiran anak dini dapat menjadi faktor penyebab terjebaknya mereka dalam kemiskinan di masa

mendatang, yang pada gilirannya akan melahirkan pekerja-pekerja anak baru yang tidak memberikan perubahan apapun.

7. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penelitian yang dilakukan UNICEF pada tahun 2005 mengangkat soal kekerasan domestik yang tinggi dialami anak-anak yang dinikahkan pada usia muda sebanyak 67 persen anak-anak yang dipaksa menikah mengalami kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan 47 persen perempuan dewasa yang menikah. Hal ini disebabkan karena anak-anak tersebut lebih banyak dinikahkan dengan laki-laki yang jauh lebih tua sehingga keputusan-keputusan rumah tangga dilakukan oleh suami mereka karena anak-anak tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi. Kekerasan seksual dalam kehidupan rumah tangga juga menunjukkan lebih banyak dialami oleh pengantin anak-anak dibandingkan dengan pengantin dewasa.

8. Konflik yang Berujung Perceraian

Setiap periode kehidupan manusia punya masalahnya sendiri-sendiri termasuk periode remaja. Remaja seringkali sulit mengatasi masalah mereka karena ketika masih anak-anak semua masalah mereka selalu diatasi oleh kedua orangtua mereka atau orang-orang dewasa. Remaja juga sering merasa dirinya telah menjadi mandiri, mereka mempunyai gengsi dan menolak bantuan dari orang dewasa lainnya sehingga membuat remaja tidak mempunyai pengalaman dalam menghadapi masalah. Akibatnya, ia mencoba bertanggung jawab kepada diri sendiri dan pasangan. Namun, sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini membuat pernikahan usia muda sering berakhir dengan perceraian.

Pernikahan dalam usia muda, memiliki dampak cukup berat karena mendorong tingginya angka perceraian. Permasalahan dalam keluarga muda yang menyebabkan terjadi perceraian dan pisah rumah biasanya terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap masa depan keluarga dan peran yang dimiliki karena ketidakstabilan emosi, gejala keinginan untuk bebas dan melakukan hal-hal yang ingin dilakukan, persoalan ekonomi dan sosial, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.

9. Banyaknya Anak Terlantar

Sering kali pasangan yang menikah di usia muda melahirkan banyak anak karena mereka tidak menjalankan keluarga berencana dan kurang mengerti mengenai alat-alat kontrasepsi. Akibatnya banyak anak yang tidak tercukupi kebutuhannya ditelantarkan oleh orang tua mereka atau diberikan kepada orang lain. Ironisnya, orang tua yang tidak menyadari akibat dari perbuatan mereka tetap saja melahirkan anak lagi meskipun tahu kebutuhan si anak tidak akan tercukupi.

10. Kurangnya Jaminan Masa Depan.

Masa depan pernikahan di usia muda kurang terjamin. Hasil penelitian Pusat Riset Innocenti Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak (UNICEF) di Itali, menyatakan, perkawinan usia muda penuh ketidakpastian dan mengandung risiko yang tak terhitung besarnya.

Pernikahan di usia muda baik karena keterpaksaan ataupun bukan biasanya menimbulkan tanggapan yang kurang baik dari sebagian masyarakat yang cenderung menganggap bahwa pernikahan terjadi karena pergaulan yang tidak baik. Pasangan muda akan sulit bersosialisasi karena telah di anggap buruk.

Pernikahan usia muda juga biasanya tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian ataupun misalnya pasangan meninggal, akan memunculkan banyak janda muda. Janda yang masih anak-anak ini akan kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri dan anak-anaknya karena banyak keterbatasan yang dimiliki. Kesulitan mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh para janda muda dan tidak sedikit yang pada akhirnya melakukan pekerjaan yang melanggar hukum²⁹.

²⁹ http://fransiska-limantata.blogspot.com/2010/01/dampak-pernikahan-di-usia-muda-terhadap_23.html

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kaitan hukum tentang perkawinan dibawah umur dalam sistem hukum di Indonesia adalah mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memperkenalkan adanya pernikahan terhadap anak dibawah umur yang ingin melangsungkan perkawinan dengan persyaratan adanya izin dari kedua orang tua, yang mana dari izin tersebut diajukan sebagai dasar untuk mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, maka pihak-pihak yang belum mencapai batasan umur dapat melakukan perkawinan.
2. Persintuhan hukum perkawinan dibawah umur terhadap perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 26 ayat 1 point c Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan selanjutnya perkawinan di bawah umur pun dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-Undang Perkawinan masih memberikan kemungkinannya, yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal

16 tahun tersebut. . Artinya antara Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur, tetapi antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak sesuai atau tidak memiliki sinkronisasi hukum sebagai peraturan perundang-undangan dalam menetapkan batas minimum umur bagi pihak-pihak untuk melakukan perkawinan.

3. Faktor dan dampak perkawinan dibawah umur adalah terdiri dari beberapa faktor yaitu adanya keinginan atau kehendak dua calon mempelai yang sangat kuat untuk berumah-tangga dengan segala konsekuensinya, tidak ditemukan halangan melangsungkan perkawinan perspektif syariat Islam, telah terpenuhinya syarat aqil baligh dan kedua calon mempelai telah erat hubungannya, dikhawatirkan melanggar norma agama, calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orang tua, calon mempelai telah hamil, dan adanya jaminan dari orang tua untuk membantu dan bertanggungjawab penuh secara moral dan materil terhadap anaknya yang menikah di usia yang belum cukup umur. Sementara terkait masalah dampak dari adanya perkawinan dibawah umur perlu merujuk pada undang-undang perlindungan anak yang menyatakan bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dengan kata lain bahwa disusunnya undang-undang perlindungan anak adalah untuk menjamin terwujudnya kehidupan yang

ideal bagi anak dan bukan untuk melegitimasi kehendak anak yang tidak wajar, seperti keinginan untuk segera menikah di usia anak-anak.

B. SARAN

1. Kaitan hukum tentang perkawinan dibawah umur dalam sistem hukum di indonesia sebaiknya lebih spesifik dalam memberikan batasan minimal untuk perkawinan atau bila diperlukan criteria calon mempelai wanita berumur serendahnya 18 Tahun dan calon mempelai pria berusia 20 Tahun dalam Undang-undang Perkawinan.
2. Seharusnya ada sinkronisasi antara Undang-undang Perkawinan dan Undang-undang Perlindungan Anak untuk menuntukan seseorang dalam kategori dewasa, karena berangkat dari kedua aturan tersebut sesungguhnya kedua Undang-undang ini tidak menginginkan adanya perkawinan dibawah umur, mengingat jika perkawinan anak dibawah umur tetap dilangsungkan berpengaruh kepada tumbuh kembang si anak.
3. Faktor dan dampak perkawinan dibawah umur yang telah disebutkan sebelumnya seharusnya dapat dikurangi dari adanya peran orang tua untuk memberi kesadaran kepada sang anak bahwa menikah harus dilaksanakan oleh orang-orang yang telah dewasa, serta adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada anak-anak yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah umur bahwa terdapat dampak negatif bilamana perkawinan dibawah umur tetap dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Hamid Sarong. 2010. *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"*. Banda Aceh:Pena
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana
- Bambang Sunggono. 2016. *"Metodologi Penelitian Hukum"*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin. 2009. *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama"*. Yogyakarta:UI Press
- Djamaluddin dan Nanda Amalia. 2016. *"Buku Ajar Hukum Perkawinan"*. Lhokseumaweh:Unimal Press
- H. Amran Suadi. 2018. *"Aspek Perlindungan Anak Indonesia"*. Jakarta: Kencana. halaman 115-117
- Ida Hanifah, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Lauma Kiwe. 2017. *"Mencegah Pernikahan Dini"*. Jogjakarta:Ar-Ruzz Media
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- R. Abdoel Jamali. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suhasril. 2016. *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan"*. Depok: Rajawali Pers
- Suma. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Titik Triwulan Tutik. 2010. *Hukum Perdata dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. JURNAL DAN INTERNET

Atiakah Rahmi, "*Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010*", De Lega Lata, Volume I, Nomor 2, halaman 275. Diakses melalui <http://publikasiilmiah.umsu.ac.id>. Selasa 11 September 2018, Pukul 20.00

Digilib Unila. "Bab II Tinjauan Pustaka Definisi Umum Hukum Perlindungan Anak". Diakses melalui www.digilib.unila.ac.id. Selasa 11 September 2018, Pukul 20:32 Wib

Digilib Uin Sby. "*Bab II Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*". Diakses melalui www.digilib.uinsby.ac.id. Kamis 13 September, Pukul 21:05 Wib,

Eprints Walisongo. "Perkawinan Usia Dini dalam Perspektif Undang-undang". Diakses melalui www.eprints.walisongo.ac.id. Kamis 13 September, Pukul 21:05 Wib,

Juan Dynash. *Sistem Hukum di Indonesia*. Melalui sistem pemerintahan indonesia.blogspot.com. Diakses 8 Agustus 2018, Pkl. 23:06 Wib.

Repository Usu. "Bab II Tinjauan Umum Tentang Hukum Perkawinan". Diakses melalui www.Repository.usu.ac.id. Kamis 16 September 2018, Pukul 19:02 Wib.

Tika Amalia. *Apa yang Diamaksud Dengan Perlindungan Anak*. Melalui, <https://www.dictio.id>. Diakses 8 Agustus 2018, Pkl. 23:12 Wib.

D. Kutipan Lainnya

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, *Ijma' Ulama*, Majelis Ulama' Indonesia, Jakarta

Mimbar Hukum. *Perkawinan dibawah Umur dalam Persfektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Volume 21 No.3. Oktober 2009.



Siapa, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muktihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN

SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : SUCI RAMADHANI SIREGAR
NPM : 1406200413
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERSINTUHAN HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM
HUKUM DI INDONESIA
Pembimbing I : ATIKAH RAHMLSH., M.H.
Pembimbing II : HIDAYAT, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
12-8-2018	Penyerahan skripsi		
	- perbaiki tulisan: kata-kata & kalimat		
	- penyusunan penulisan sesuai pedoman.		
19-8-2018	Penyerahan perbaikan skripsi		
24-8-2018	Tambah halaman skripsi		
04-9-2018	Perbaiki halaman, Catatan kaki.		
11-9-2018	perbaiki Bab I dan Bab II.		
14-9-2018	perbaiki Bab III dan Bab IV (tambahkan bagian)		
23-9-2018	Tambahkan kalimat Bab IV (kesimpulan & saran)		
	diternpernakan. (Edit kembali)		
2-10-2018	Seumpurnan masih ada y salah (edit) ke Pembimbing I		
11/10-2018	Perbaiki Labilabakang. bahwa penekipin, Bab III & IV		
16/10-18.	Bab IV belum fokus mengenai apa.		
15/11-18	Ace Di perbaiki		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H.

Pembimbing I

ATIKAH RAHMLSH., M.H.

Pembimbing II

HIDAYAT, S.H., M.H.